

Wapres Terima Laporan soal Keamanan Papua dari Mahfud MD

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima laporan soal keamanan Papua dari Menko Polhukam. Mahfud MD, di kediaman dinas Wapres, Rabu (9/6).

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, pembahasan tentang keamanan di Papua dilakukan agar pembangunan di wilayah tersebut bisa segera dilaksanakan seperti yang sudah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua.

"Menko Polhukam yang membawahi unsur-unsur keamanan dalam negeri bertanggung jawab terkait bagaimana sisi keamanan, terutama di Papua seperti apa kondisi terakhirnya," kata Masduki kepada wartawan, usai pertemuan.

"Itulah yang dilaporkan dalam rangka bagaimana agar pembangunan di Papua

untuk menyejahterakan masyarakatnya harus segera dipercepat," kata Masduki.

Sisi keamanan menjadi penting, kata dia, agar pembangunan di Papua bisa segera terlaksana. Jika pembangunan terlaksana, maka masyarakat Papua pun bisa menjadi sejahtera seperti di daerah lainnya di Indonesia.

Masduki mengatakan, dalam pertemuan disimpulkan tentang bagaimana agar program-program yang ada dipercepat pelaksanaannya sehingga bisa menguntungkan Papua. "Untuk itu akan segera ada rapat lanjutan yang berkaitan dengan bagaimana supaya APBN yang dipergunakan untuk membangun kesejahteraan Papua bisa segera direalisasikan," katanya.

Dalam waktu dekat, kata Masduki, Wapres juga akan segera memanggil Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan untuk membahas terkait anggaran. ● mei

DPR Tunggu Surat Presiden, Terkait Rencana Revisi UU ITE

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua DPR Sufrmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR mendukung keinginan pemerintah yang memutuskan akan merevisi beberapa pasal dalam Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Terkait hal itu, DPR masih menunggu surat presiden (surpres) terkait revisi UU ITE sebelum memulai pembahasan dalam rapat.

"Kita lihat apakah benar. Nanti surat tersebut atau permintaan dari pemerintah masuk ke DPR," kata Dasco dalam pernyataan video yang diterima wartawan, Rabu (9/6).

Meski mengakui surpres belum diterima, Dasco memastikan bahwa DPR akan menjalankan proses pembahasan RUU ITE sesuai

mekanisme yang berlaku.

Menurut Dasco, nantinya RUU ITE akan dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI jika surpres telah diterima. "Ya kita akan jalankan sesuai prosedur yang ada. Kita akan rapatkan di Bamus, dan lain-lain sesuai dengan prosedur yang ada," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta berharap, kabar mengenai pemerintah akan merevisi UU ITE benar adanya. Sebab, menurutnya kabar pemerintah akan merevisi UU ITE bukanlah kabar pertama yang ia dengar.

"Belum sampai DPR suratnya. Ini bukan kabar yang pertama. Semoga kali ini benar, sehingga bisa disikapi dengan tepat," ucap Sukamta. ● mei

IDN/ANTARA



RDP KOMISI VI DENGAN DIRUT ASABRI
Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Wahyu Suparyono mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6). Rapat tersebut membahas kinerja perusahaan ASABRI.

Bambang Pacul Sebut Puan Maharani Teh Botol Sosro, Ganjar: Silakan Diminum

SEMARANG (IM) - Jagat dunia maya dihebohkan dengan rekaman yang diduga suara Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, Bambang mengibaratkan sosok Puan Maharani seperti teh botol Sosro pada ajang Pilpres 2024.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi santai munculnya rekaman suara koleganya sesama kader PDIP.

"Kalau terkait dengan teh botol sosro silakan diminum di depan," ujar Ganjar singkat, Selasa (8/6).

Di sisi lain, Ganjar berulang kali enggan menanggapi serius tentang bursa pencapresan 2024. Meski sejumlah lembaga survei menempatkan pada urutan teratas, namun politikus PDIP itu belum menyampaikan secara resmi untuk maju dalam kontestasi Pilpres.

Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto alias Bambang mengakui rekaman tersebut adalah suaranya.

"Sebagai pribadi tentu saya kecewa dengan terbarnya percakapan ini, yang sejak awal sudah saya nyatakan bahwa apa yang saya akan nyatakan dalam pertemuan tersebut merupakan latar belakang tentang apa yang saya nyatakan secara

resmi di depan publik," kata Pacul dalam keterangannya.

"Cerita latar belakang yang saya sampaikan kepada teman-teman wartawan yang semuanya saya kenal baik, bersama beberapa kolega yang saya percaya, dan saya nyatakan Off The Record (OTR) tersebut, ternyata disebarluaskan," lanjut dia.

Pacul menjelaskan, saat itu ia dan sejumlah wartawan dan koleganya tengah berdiskusi secara terbuka. Namun, ia kecewa karena sejumlah wartawan membocorkan rekaman yang merupakan diskusi off the record itu.

"Saya kecewa adalah ketidakmampuan teman-teman menjaga profesionalitas dan proporsionalitas sehingga terjadi hal yang mencoreng integritas teman-teman yang ada dalam diskusi itu," jelasnya.

Pacul mengatakan, karena diskusi merupakan obrolan informal, maka wajar, istilah yang dikeluarkan adalah analogi spontan. Sebab, sejak awal diskusi memang bukan untuk dipublikasikan.

"Jargon 'Teh Botol Sosro' yang terlontar adalah termasuk dari wujud spontanitas, sebagai refleksi pemahaman Bambang Pacul sebagai orang lapangan, sebagai analogi untuk memudahkan pemahaman bagi hadirin yang hadir dalam diskusi off the record tersebut," kata Pacul. ● mei

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



PENGUATAN ANTIKORUPSI PENYELENGGARA NEGARA

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan Penguatan Antikorupsi para pejabat negara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/6). KPK melakukan penguatan antikorupsi para pejabat negara di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas).

Eks Anak Buah Juliari Pernah Terima Rp150 Juta Uang dari Seorang Pengusaha

Mantan Mensos Juliari Batubara didakwa terima suap Rp32 miliar dari para pengusaha yang menggarap pengadaan Bansos untuk penanganan Covid-19.

JAKARTA (IM) - Direktur PT Andalan Pesik International, Rocky Joseph Pesik, mengakui pernah memberikan Rp150 juta kepada mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Sosial (Kemensos), Matheus Joko Santoso. Uang sebesar Rp150 juta itu diberikan kepada Matheus Joko sebagai bentuk terima kasih.

Demikian diakui Rocky saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 untuk terdakwa mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Rocky mengakui meny-

erahkan uang ke mantan anak buah Juliari tersebut dalam tiga kali tahapan. "Ada memberikan untuk Matheus Joko. ada 3 kali Rp50 juta. Tiga kali. (totalnya) Rp150 juta. (Sebagai uang) terima kasih saja," ungkap Rocky di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (9/6).

Rocky berdalih bahwa uang Rp150 juta itu diserahkan tanpa kesepakatan dengan Matheus Joko sebelumnya. Uang itu, diklaim Rocky, diberikan secara mendadak sebagai ungkapan terima kasih. "Tidak ada kesepakatan," singkatnya. PT Andalan Pesik Inter-

national merupakan salah satu perusahaan yang mendapatkan jatah kuota untuk menggarap proyek bansos Covid-19. Pemberian fee sebesar Rp150 juta itu untuk Matheus Joko tersebut sesuai dengan dakwaan Juliari Batubara.

Dalam perkara ini, Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap sebesar Rp32.482.000.000 (Rp32 miliar) dari para pengusaha yang menggarap proyek pengadaan Bansos untuk penanganan Covid-19.

Puluhan miliar uang dugaan suap untuk Juliari Batubara itu berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19. Diantaranya yakni, PT Pertani, PT Mandala Hamongangan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama.

Uang sebesar Rp32 miliar itu diduga diterima Juliari Batubara melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Adapun, rincian uang yang

diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari Konsultan Hukum, Harry Van Sidabukke, senilai Rp1,28 miliar.

Kemudian, dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Madandanatja, sejumlah Rp1,95 miliar. Lantas, sebesar Rp29 miliar berasal dari para pengusaha

penyedia barang lainnya.

Atas perbuatannya, Juliari didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. ● han

Kejagung Tangkap Buronan Kasus Korupsi Jalan Tebo Jambi di Jaktim

JAKARTA (IM) - Tim gabungan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi Jambi menangkap buronan kasus dugaan korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Pondok Rongon, Kabupaten Tebo, Jambi, bernama Musashi Pangeran Batara.

Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan, buronan tersebut ditangkap di Jalan Dukuh, Kramatjati, Jakarta Timur, Selasa (8/6) kemarin.

"Tim Tabur Kejaksanaan Agung bersama Tim Tabur Kejaksanaan Tinggi Jambi mengamankan buronan tindak pidana korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Pondok Rongon Kabupaten Tebo atas nama terpidana Musashi Pangeran Batara," kata Leonard dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Leonard menjelaskan, ber-

dasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 4/PIDSUS-TPK/2021/PTJMB Tanggal 16 April 2021, Pangeran Batara merupakan terpidana dalam perkara korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Pondok Rongon Kabupaten Tebo.

Dalam perbuatannya itu, Pangeran Batara telah membuat negara merugi Rp15 miliar. Ia terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Terpidana dijatuhi hukuman selama lima tahun penjara serta denda Rp50.000.000, dan apabila terpidana tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama satu bulan," ujar Leonard. ● mei

PENGUMUMAN

PEMBUBARAN REKSA DANA BERLIAN KHATULISTIWA SAHAM

PT Berlian Aset Manajemen dengan ini mengumumkan Pembubaran Reksa Dana Berlian Khatulistiwa Saham sejak tanggal 09 Juni 2021, sesuai dengan POJK No.23/POJK.04/2016 Pasal 45 Huruf d tentang Pembubaran Reksa Dana berbentuk KIK serta surat OJK No.S-97/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 Huruf 3 tentang Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 160 Hari Bursa berturut-turut.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui publik.

PT BERLIAN ASSET MANAJEMEN

The Bellezza Shopping Arcade Lt.3

Unit 330-331

Jl. Letjen. Soepeno No.34 Jakarta 12210

Telp.021-30068871, Fax.021-30068874

Direksi

PEMBUBARAN

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. INDO BIOMEDICAL, berkedudukan di Kabupaten Bogor tanggal 05 Juni 2021 yang dituangkan dalam akta no. 1 tanggal 08 Juni 2021 dibuat dihadapan WAHYUNI, SH, Notaris di Kabupaten Bogor, antara lain telah diputuskan :

1. Menyetujui membubarkan PT. INDO BIOMEDICAL

2. Menyetujui menunjuk Direktur Perseroan sebagai Likuidator Perseroan dan memberi kuasa kepadanya untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam hal pelaksanaan pembubaran Perseroan, tidak ada tindakan yang dikecualikan, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atas likuidasi yang dilakukan

Kepada kreditor atau para pihak yang berkepentingan dapat menghubungi Likuidator pada alamat : Jl. Teguh Birman No.1 Ruko Office Park Cibinong City Center Blok A No.26, Cibinong-Bogor untuk menyelesaikan segala hutang piutang Perseroan dalam waktu 60 hari terhitung sejak pengumuman ini.

Bogor, 10 Juni 2021

Direksi

KASUS SUAP WALI KOTA TANJUNGBALAI

Azis Syamsuddin Akhirnya Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Azis Syamsuddin akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (9/5).

"Hari ini saksi Azis Syamsudin telah hadir di gedung merah putih KPK memenuhi panggilan penyidik KPK," ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (9/6).

Azis sedianya bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2022.

"Akan segera dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tersangka SRP dkk," jelasnya.

Sebenarnya pada Jumat 7 Mei 2021 lalu, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Azis untuk tersangka Robin, Namun azis tak bisa hadir dengan alasan masih ada kegiatan lain

Sebagai informasi, KPK sudah mencegah Azis Syamsuddin untuk bepergian ke

luar negeri. Politikus Golkar itu dilarang bepergian ke luar negeri enam bulan ke depan terhitung sejak 27 April 2021.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni penyidik KPK Nonaktif AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP), Walikota Tanjung Balai periode 2016-2021 M Syahril (MS), dan seorang pengacara bernama Maskur Husain (MH).

Sebelumnya, Ketua KPK Firlil Bahuri mengungkapkan Azis Syamsuddin menjadi aktor dibalik pertemuan antara penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP) dengan Walikota Tanjung Balai periode 2016-2021 M Syahril (MS).

"Pada Oktober 2020, SRP melakukan pertemuan dengan MS di rumah dinas AZ (Azis Syamsudin) Wakil Ketua DPR RI di Jakarta Selatan," ujar Firlil dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis (22/4) silam.

Dalam pertemuan tersebut, Azis Syamsuddin memperkenalkan Stepanus dengan

Syahril karena diduga Syahril memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap Penyidikan.

Menindaklanjuti pertemuan di rumah Azis, kemudian Robin menugaskan MH kepada MS untuk bisa membantu permasalahannya.

Robin, bersama Maskur sepakat untuk membuat komitmen dengan Syahril terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp1,5 Miliar.

"MS menyetujui permintaan SRP dan MH tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik RA (Riefka Amalia) teman dari saudara SRP dan juga MS memberikan uang secara tunai kepada SRP hingga total uang yang telah diterima SRP sebesar Rp1,3 Miliar," ungkap Firlil. ● han

IDN/ANTARA



RAKER KOMISI III DENGAN MENKUMHAM

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6). Rapat tersebut membahas rencana kerja bidang legislasi tahun 2021, evaluasi terhadap pelaksanaan rencana prioritas kerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian.

BBR
PT PELAYARAN NASIONAL
BINA BUANA RAYA Tbk

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk

Dengan ini diberitahakan kepada Para Pemegang Saham PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa keduanya selanjutnya disebut "Rapat", di Jakarta pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 30 Juni 2021.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadirannya dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas **Electronic General Meeting System KSEI (eASY. KSEI)** dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, panggilan Rapat akan diumumkan dalam laman BEI yakni www.idx.co.id, eASY:KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id> serta laman Perseroan www.bbr.co.id pada tanggal 25 Juni 2021.

Merujuk pada ketentuan dalam pasal 16 POJK No. 15/POJK.04/2020, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu tanggal 18 Juni 2021 dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud sepanjang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 10 Juni 2021

PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk.

Direksi